

ABSTRAK

M.Djazman Addin.S. *Daya Tarik Sistem Pendidikan SMA terhadap Peningkatan Jumlah Siswa Migran di Kota Parepare* (Dibawah Bimbingan **Shirly Wunas** dan **Roland A.Barkey**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sistem pendidikan di Kota Parepare dan menganalisis pengaruh faktor penarik dan faktor pendorong terhadap peningkatan jumlah siswa migran di Kota Parepare. Jumlah sampel sebanyak 110 orang yang tersebar di SMAN 1 Parepare, SMAN 3 Parepare dan SMAN 5 Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi faktor penarik bagi siswa untuk melakukan migrasi dan bersekolah di Kota Parepare adalah kondisi sarana pendidikan dan sarana penunjang yang tersedia lengkap, tingginya kompetensi guru, sehingga siswa dan orang tuanya menjadi bangga dan memiliki motivasi yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, meskipun kondisi perekonomian orang tua yang cukup dan jarak dengan daerah asal cukup jauh. Selain itu, tersedianya kesempatan kerja yang cukup tinggi juga memberikan motivasi bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di Kota Parepare.

ABSTRACT

M. Djazman Addin.S. Attractive Power of Education System For Senior High School to The Amount Improvement of Migrant Students in Parepare City (Supervised by **Shirly Wunas and Roland A. Barke y**).

This research was aimed to identify the condition of education system in Parepare and to analyze the influence of attractive and support factors to the amount improvement of migrant students in Parepare City. Total sampel was 110 people distributed in State Senior High School 1, 3 and 5 of Parepare. The results of this research showed that the main factor becoming the attractive factors for students to migrate and study in Parepare were condition of education and complete support facilities, degree of teacher competency, so students and their parents would be proud and had a strong motivation to continue their study, although the economical condition of parents were enough and their domiciles were enough far from Parepare. In addition to it, the availability of job opportunity that is enough high also gave motivation for student to continue their education in Parepare City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan proses yang dinamis, rumit dan berdimensi banyak. Sekalipun seluruh *stakeholder* sudah dilibatkan, belum tentu hasilnya memuaskan. Dengan kata lain, senantiasa lahir hasil-hasil yang tidak diinginkan (eksternalitas), terutama berkenaan dengan pengangguran, subsidi salah sasaran dan kemiskinan.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah. Hal ini terkait dengan adanya kesadaran bahwa pendidikan yang bermutu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu bangsa bukan modal fisik maupun sumber daya material, melainkan merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial ekonomi bangsa yang bersangkutan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Profesor Frederik dari Universitas Princeton yang dikutip oleh Todaro (2000) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena sumber daya manusia adalah agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Jelaslah, bahwa

suatu negara yang tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak dapat memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional, maka untuk selanjutnya negara tersebut tidak akan dapat mengembangkan apa pun.

Pendidikan merupakan permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak asasi manusia, sistem pemerintahan dan agraria tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Krisis multidimensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis pada sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, bahkan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Secara logika dapat disimpulkan bahwa pendidikan bermutu menghasilkan sumber daya yang bermutu dan merupakan kata kunci dari keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan mengenai fungsi pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan Sistem Pendidikan Nasional tersebut dibutuhkan manajemen Sisdiknas yang dapat direncanakan, dikembangkan dan diimplementasikan secara tepat (Kansil, 2001:57)

Menurut Tilaar (2003 :11), ada tiga prinsip pokok yang berkaitan dengan masalah manajemen pendidikan tersebut yakni (1) pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Sebagai suatu kebutuhan dasar, pendidikan itu haruslah sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa sistem pelayanan, organisasi serta pelaksanaan program pelayanan itu harus sedekat mungkin dengan masyarakat, (2) berkaitan dengan sistem pelayanan (*delivery system*) yang harus sedekat mungkin dengan klien, maka dikotomi sentralisasi-desentralisasi akan mewarnai pelaksanaan fungsi tersebut. Sentralisasi yang kaku cenderung akan mematikan prinsip individualisme atau hak untuk dibedakan, di pihak lain desentralisasi yang berlebihan akan mematikan keinginan bersama untuk menggalang kesatuan dan persatuan sebagai unsur bangsa. (3) selanjutnya, agar kedua prinsip pokok di atas dapat berfungsi, pendekatan sistem (*system approach*) haruslah digunakan dalam menempatkan kegiatan pendidikan sebagai aspek pembangunan masyarakat dan pembangunan nasional.

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang berinterdependensi dengan sektor lainnya dalam pembangunan, khususnya dengan sektor ekonomi. Demikian pula dalam menempatkan fungsi pendidikan dalam dikotomi sentralisasi-desentralisasi sistem pemerintahan dan pembangunan nasional, pendekatan sistem akan mengungkapkan dinamika yang diperlukan dalam proses pembangunan masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan wilayah, pemerintah Kota Parepare juga telah menetapkan kebijakan pendidikan sebagai salah satu arahan kebijakan pembangunan Kota Parepare. Disadari, bahwa sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat diperoleh melalui mekanisme pendidikan yang bermutu pula.

Sejalan dengan itu, maka berdasarkan UU No 13 Tahun 2001 tentang penetapan Kota Parepare sebagai daerah otonomi memberikan indikasi mengenai adanya kewenangan penuh Pemerintah Kota Parepare untuk menetapkan visi dan misi pendidikan serta merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan. Dengan mengacu pada rencana strategis di bidang pendidikan, maka visi pendidikan di Kota Parepare adalah terwujudnya manusia yang beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur, menguasai ilmu, teknologi dan seni, berwawasan masa depan, kebudayaan dan kebangsaan serta berwatak demokratis dan mandiri. Untuk mencapai visi pendidikan tersebut, salah satu misinya adalah mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara adil dan merata.

Dinas Pendidikan merupakan institusi yang berperan sebagai fasilitator. Disamping itu, disadari bahwa dalam dunia pendidikan, seperti halnya kehidupan sosial kultural, tidaklah mungkin memecahkan masalah pendidikan hanya dengan menggunakan satu pendekatan. Sejalan dengan itu Dinas Pendidikan Kota Parepare telah menyusun program dan kegiatan prioritas tahun 2002 - 2006 yakni (1) program dalam mewujudkan Parepare sebagai Kota Pendidikan dengan 9 indikator, (2) memperluas akses pendidikan, (3) menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sehingga memenuhi standar pelayanan minimal, (4) meningkatkan mutu pendidikan, (5) mengaktifkan kegiatan pemuda dan keolahragaan dan (6) pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme institusional pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan formal (Todaro, 2000). Sebagian besar negara meyakini bahwa penciptaan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat secara kuantitatif merupakan kunci utama menyukseskan pembangunan nasional.

Posisi Kota Parepare sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berpotensi strategis untuk tumbuh sejajar dengan kota-kota perdagangan lain. Ditunjang oleh potensi geografis yang strategis dan wilayah hinterland yang luas, maka tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan potensi dan peluang tersebut menjadi daya dorong pertumbuhan kota.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan tersebut, maka salah satu arah kebijakan umum APBD Kota Parepare di bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan lembaga/organisasi pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Dalam upaya perwujudan dan pelaksanaan visi, misi dan kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan di Kota Parepare tersebut dituangkan dalam kebijakan operasional.

Menyadari hal tersebut, salah satu program kebijakan di bidang pendidikan adalah peningkatan fasilitas dan prasarana pendidikan yang memadai, serta peningkatan mutu bagi tenaga pengajar. Keadaan pendidikan Kota Parepare ini memberikan angin segar bagi penduduk di sekitar wilayah Kota Parepare untuk melanjutkan pendidikan. Mereka melakukan migrasi ke Kota Parepare dengan adanya dorongan dari daerah asal dan daya tarik kota Parepare.

Sejalan dengan Marbun dalam Kota Masa Depan (1994) dikemukakan bahwa ada dua faktor sehingga penduduk melakukan migrasi, yaitu : (1) Faktor pendorong berupa kemiskinan di desa, sempitnya lapangan kerja, pendapatan yang rendah, adat isitiadat yang ketat dan ingin melanjutkan pendidikan; (2) Faktor penarik, yaitu berupa melanjutkan pendidikan, karena mutu pendidikan tidak memadai, cerita tentang kota bahwa kota gampang cari pekerjaan, dapat melakukan usaha kecil-kecilan dengan mudah, hiburan lebih banyak, beberapa

pribadi yang luas, adat istiadat yang longgar, dan banyak lagi faktor pribadi yang mempengaruhi.

Seiring dengan derasnya arus migrasi, terutama migrasi siswa dari daerah sekitar maka semakin besar pula beban Kota Parepare akan tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama penyediaan lahan pemukiman, serta sarana dan prasarana lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Daya Tarik Sistem Pendidikan SMA terhadap Peningkatan Jumlah Siswa Migran di Kota Parepare".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi sistem pendidikan di Kota Parepare?
2. Bagaimana pengaruh faktor penarik dan faktor pendorong terhadap peningkatan jumlah siswa migran di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi sistem pendidikan di Kota Parepare
2. Menganalisis pengaruh faktor penarik dan faktor pendorong terhadap peningkatan jumlah siswa migran di Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi perumus kebijakan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan prasarana pendidikan sebagai salah satu pengembangan wilayah Kota Parepare.
2. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan ditinjau dari aspek kewilayahan dan pertumbuhan penduduk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Interaksi Pusat Kota dengan Wilayah Sekitarnya

Pengertian kota adalah suatu permukiman yang bangunan rumahnya rapat, dan penduduknya bernafkah bukan pertanian. Suatu hal yang khas bagi suatu kota adalah bahwa kota itu umumnya mandiri atau serba lengkap (*selfcontained*), yang berarti penduduk kota bukan hanya bertempat tinggal saja di dalam kota itu, tetapi bekerja mencari nafkah dan berekreasi pun dilakukan di dalam kota itu. Kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi (Budiharjo, 1997).

Bintarto (1997) menyatakan bahwa kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dengan coraknya yang materialistis atau dapat pula diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan. Penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dengan daerah belakangnya.

Konsentrasi kegiatan-kegiatan ekonomi terletak pada tataruang yang pada umumnya adalah kota-kota. Proses industrialisasi dan urbanisasi ke kota-kota besar berlangsung terus dan menunjukkan gejala yang semakin meningkat. Konsep tata ruang dan wilayah polarisasi muncul sebagai hasil

dari observasi struktur kota-kota. Struktur hirarkis pusat-pusat atau kota-kota dapat ditentukan dengan menggunakan ukuran jumlah penduduk, tingkat kegiatan ekonomi, tersedianya kelengkapan fasilitas-fasilitas pelayanan, tingkat kemakmuran dan kemampuan berkembangnya. Pada umumnya kota-kota besar mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota kecil, fasilitas-fasilitas pelayanannya (terutama fasilitas distribusi) tersedia relatif lebih lengkap, demikian pula dalam hal jumlah dan jenis lapangan kerja serta tingkat kemakmuran penduduknya (Adisasmita, 2005a).

Adisasmita (2005b), hirarki kota masing-masing kota dapat ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk dan jumlah fasilitas pelayanan yang dimiliki. Fasilitas pelayanan kota meliputi fasilitas-fasilitas di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya. Hirarki kota dapat ditentukan pula berdasarkan arus kegiatan arus barang ke dalam masing-masing kota; kegiatan jasa distribusi (barang) ini mencerminkan fungsi primer kota. Kota hirarki (orde) I merupakan pusat yang tidak berada dalam sub ordinasi kota-kota lainnya dalam suatu wilayah. Kota-kota hirarki I melayani seluruh wilayah pengaruhnya melalui kota-kota hirarki yang lebih rendah yang ada dalam sub ordinasinya. Dalam hubungan keluar, kota hirarki I memiliki fasilitas pelayanan yang terlengkap dan berkemampuan pelayanan yang tertinggi. Kota-kota hirarki II melayani wilayah pengaruh melalui kota-kota yang berada dalam wilayah sub ordinasinya. Kota-kota hirarki II memiliki fasilitas pelayanan setingkat di

bawah dan berkemampuan pelayanan setingkat lebih rendah dari kota hirarki I.

Pengelolaan wilayah perkotaan mutlak membutuhkan mekanisme kelembagaan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam kelembagaan tersebut, perencanaan pembangunan perkotaan dirumuskan secara komprehensif atas dasar kebutuhan *stakeholder* dan aliran insentif ekonomi. Proses tersebut diharapkan semaksimal mungkin mengalirkan investasi, pertumbuhan aktivitas usaha kecil dan menengah, lansekap dan infrastruktur yang nyaman serta sinergi kota dan desa. Pada sisi sebaliknya, pengelolaan kota dapat menekan entropi seperti kriminalitas, kemiskinan, kerusakan lingkungan atau aktivitas ekonomi biaya tinggi (Nugroho dan Rochmin, 2004).

Menurut Koestoer (2001) kota adalah pusat dari kegiatan ekonomi, pemerintahan, politik, dan sosial sehingga membuat perkembangan di segala bidang seperti pembangunan fisik kota, yaitu bangunan-bangunan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan juga pembangunan manusianya yang tinggal di kota maupun yang beraktivitas dengan keahlian maupun kemakmuran. Manusia yang bekerja pada daerah perkotaan mempunyai klasifikasi berdasarkan aktivitas pekerjaannya, yaitu: (a) Aktivitas primer, seperti aktivitas yang mengandalkan hasil hutan, tambang, perikanan, pertanian yang nonkomersial, (b) Aktivitas sekunder, yaitu aktivitas yang melibatkan produksi massal seperti mekanisasi pertanian, buruh pabrik, (c) Aktivitas tersier, yaitu aktivitas pemenuhan dan distribusi dari kegiatan jasa,

(d) Aktivitas kuarter, adalah aktivitas yang menggunakan pemrosesan informasi untuk pekerjaannya, yang banyak dilakukan oleh pegawai-pegawai yang bekerja di kantor.

Tarigan (2005) menyatakan bahwa hierarki perkotaan sangat terkait dengan hierarki fasilitas kepentingan umum yang ada di masing-masing kota. Hierarki perkotaan dapat membantu untuk menentukan fasilitas apa yang harus ada atau perlu dibangun di masing-masing kota. Fasilitas kepentingan umum bukan hanya menyangkut jenisnya tetapi juga kapasitas pelayanan dan kualitasnya. Jenis fasilitas itu mungkin harus ada mulai dari kota kecil hingga kota besar tetapi kapasitas pelayanan harus berbeda demikian juga kualitasnya. Tujuan pengaturan adalah agar terdapat efisiensi, biaya pembangunan dan perawatan fasilitas tidak berlebihan (mubazir), namun masyarakat pun dapat terlayani tanpa mengorbankan biaya yang berlebihan. Tanpa perencanaan pun hal ini terkadang sudah terjadi karena pengaruh mekanisme pasar. Namun pengetahuan yang baik tentang hal ini akan mempercepat pengaturan keberadaan dari fasilitas tersebut.

Tempat-tempat konsentrasi yang umumnya berupa daerah perkotaan tersebar di suatu wilayah/negara dengan penduduk (besarnya kota) yang tidak sama. Setiap kota memiliki daerah belakang atau wilayah pengaruhnya. Makin besar suatu kota makin beragam fasilitas yang disediakan sehingga makin luas wilayah pengaruhnya. Suatu kota yang besar selain memiliki daerah belakang yang berupa daerah pertanian juga

memiliki beberapa kota kecil. Apabila kota kecil banyak tergantung dari kota besar maka kota kecil termasuk di dalam daerah pengaruh dari kota yang lebih besar. Misalnya kota kecil membeli berbagai keperluan dan menjual berbagai hasil produksinya ke kota besar. Demikian juga banyak penduduk dari kota kecil yang pergi bekerja, mencari tempat pendidikan dan berbagai urusan lainnya ke kota besar. Dengan contoh seperti itu mudah menetapkan perbedaan rankingnya. Biasanya kota yang paling besar wilayah pengaruhnya, diberikan ranking satu atau kota orde kesatu, yang lebih kecil berikutnya diberi ranking dua dan seterusnya. Kota orde kesatu tidak merupakan subordinat kota lain. Kota orde kedua berada dalam subordinat kota ranking kesatu dan kota orde ketiga berada dalam subordinat kota orde kedua dan seterusnya.

B. Sistem Pendidikan

Kelahiran Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya merupakan salah satu wujud reformasi bangsa dalam bidang pendidikan sebagai respons terhadap berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang baik global, nasional, maupun lokal. Dalam konsideran UU tersebut dinyatakan: *“bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan*

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.”

Surya (2004) menyatakan bahwa Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengandung sejumlah paradigma baru yang menjadi landasan perwujudan pendidikan nasional. Paradigma tersebut, antara lain :1. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilandasi dengan prinsip-prinsip berikut ini : a) Secara demokratis dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keagamaan, dan budaya bangsa.b) Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.c) Sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat. d) Sebagai proses keteladanan membangun kemauan dan kreativitas dalam proses pembelajaran.e) Mengembangkan budaya belajar (baca, tulis, dan hitung) bagi segenap warga masyarakat.f) memberdayakan masyarakat melalui partisipasi dan pengendalian mutu layanan pendidikan.2. Demokratisasi dan desentralisasi sebagai semangat yang melandasi penyelenggaraan pendidikan nasional dengan lebih menekankan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam keseluruhan aktivitas penyelenggaraan pendidikan. 3. Peran serta masyarakat sebagai konsekuensi demokratisasi pendidikan nasional maka masyarakat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.4. Tantangan global, hal ini berimplikasi bahwa pendidikan nasional harus beradaptasi dengan

perkembangan global yang menuntut sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam menghadapi persaingan global di segala bidang.⁵ Kesetaraan dan keseimbangan, bahwa Undang-undang Sisdiknas yang baru mengandung paradigma dengan menerapkan konsep kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah memiliki kesetaraan dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Sedangkan yang dimaksud keseimbangan ialah keseimbangan yang utuh antara unsur-unsur kepribadian yang meliputi aspek intelektual, spiritual, emosional, fisik, sosial, moral, dan kultural.

1. Kurikulum

Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan yang mana pun. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya perencana pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakannya. Mengingat pentingnya peran kurikulum, maka kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh semua pelaksana kurikulum. Pada kenyataannya, sementara pihak memang ada yang memahami kurikulum itu hanya dalam arti kata yang sempit, yaitu kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan tertentu. Jika demikian adanya, maka dinamika PBM serta kreativitas guru dan murid akan terhenti. Guru dan murid hanya terhenti pada sasaran materi yang dicanangkan pada buku kurikulum itu saja tanpa memperhatikan aspek lain yang telah berkembang begitu cepat di masyarakat. Di lain pihak memang ada yang

memandang kurikulum dalam arti luas, yaitu kurikulum yang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan dan dialami peserta didik dalam perkembangan, baik formal maupun informal guna mencapai tujuan pendidikan.

Lanjut dikemukakan bahwa kurikulum dapat diartikan sebagai program atau pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial anak didik.

Pengertian kurikulum menurut beberapa ahli dirangkum oleh Nasution (2003) sebagai berikut :

1. **J.Galen Saylor dan William M. Alexander** dalam buku ***Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*** menjelaskan arti kurikulum sebagai berikut : *“The curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning, whether in the classroom. On the playground, or out of school”*. Jadi segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau luar sekolah termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi juga apa yang disebut kegiatan ekstra-kurikuler.

2. **Harold B. Alpert** dalam bukunya ***Reorganizing The High School Curriculum*** memandang kurikulum sebagai “*all of the activities that are provided for students by the school*”. Seperti halnya dengan definisi Saylor dan Alexander, kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain, di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Definisi ini melihat manfaat kegiatan dan pengalaman siswa di luar mata pelajaran tradisional.
3. **B.Othanel Smith, W.O. Stanley, dan J.Harlan Shores** memandang kurikulum sebagai : “*a sequence of potential experiences set up in the school for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting* “. Mereka melihat kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda, agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya.
4. **William B.Ragan** dalam buku ***Moderen Elementary Curriculum*** menjelaskan “*the tendency in recent decades has been to use the term in a boarder sense to refer to the whole life and program of the school*”. Ragan menggunakan kurikulum dalam arti yang luas, yang meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah.

5. **J. Lloyd Trumph** dan **Delmas F. Miller** dalam buku **Secondary School Improvement** juga menganut defenisi kurikulum yang luas. Menurut mereka dalam kurikulum juga termasuk metode mengajar dan belajar, cara mengevaluasi murid dan seluruh program, perubahan tenaga mengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah ruangan serta kemungkinan memilih mata pelajaran. Ketiga aspek pokok, program, manusia dan fasilitas sangat erat hubungannya, sehingga tak mungkin diadakan perbaikan kalau tidak diperhatikan ketiga-tiganya.
6. **Alice Miel** juga menganut pendirian yang luas mengenai kurikulum. Dalam bukunya **Chaning the Curriculum : a social Process** mengemukakan bahwa kurikulum juga meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap orang-orang melayani dan dilayani sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik dan personalia (termasuk juga penjaga sekolah, pegawai administrasi dan orang lainnya yang ada hubungannya dengan murid). Jadi kurikulum meliputi segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak di sekolah. Defenisi Miel tentang kurikulum sangat luas yang mencakup bukan hanya pengetahuan, kecakapan, kebiasaan-kebiasaan, sikap, apresiasi, cita-cita serta norma-norma, melainkan juga pribadi guru, kepala sekolah serta seluruh pegawai sekolah.

7. **Edward A.Krug** dalam ***The Secondary School Curriculum*** menunjukkan pendirian yang terbatas tapi realistis tentang kurikulum. Defenisinya ialah “ *a curriculum consist of the means used to achieve out given purposes of schooling*”. Kurikulum dilihatnya sebagai cara-cara dan usaha untuk mencapai tujuan persekolahan.

Hal ini seiring dengan pendapat Said Hamid Hasan (1988) yang berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya terdapat empat dimensi kurikulum, yaitu (a) kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi, (b) kurikulum sebagai rencana tertulis, (c) kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses, dan (d) kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sekolah kita dalam arti produk masih mengandung banyak kerancuan. Sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA serta SMK memiliki kurikulum yang amat sarat dengan mata pelajaran. Dampak nyata yang terlihat ialah daya serap peserta didik tidak optimal dan mereka cenderung belajar tentang banyak hal, tetapi dangkal.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka kurikulum dapat ditafsirkan sebagai :

1. Kurikulum dapat dilihat sebagai **produk**, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, yang misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan.
2. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai suatu **program**, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ia dapat berupa

mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat pula meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa, misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, dan lain-lain.

3. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai **harapan**, yakni hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari.
4. Kurikulum sebagai **pengalaman** siswa. Ketiga tafsiran di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum sedangkan tafsiran ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada setiap siswa. Ada kemungkinan, bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana.

2. Siswa

Wajib belajar sembilan tahun telah menjadi agenda nasional yang amat penting, hal ini memang memiliki alasan dan legitimasi yang amat strategik. Suyanto (2000) menyatakan bahwa “angkatan kerja kita saat ini sebagian besar, kurang lebih 76 %, hanya memiliki pendidikan tidak lebih dari sekolah dasar.” Kondisi seperti ini cukup mencemaskan jika harus bersaing secara global dalam berbagai aspek kehidupan. Kita tidak dapat lagi menjadikan jumlah penduduk yang besar dengan upah yang murah sebagai salah satu daya tarik investor asing untuk ikut menanamkan modal.

Justru kualitas penduduk yang perlu dijadikan sebagai daya tarik bagi para investor asing untuk memasuki Indonesia.

Hal ini dapat terjadi karena pada abad ke-21, ciri penting pola hubungan antarnegara dan bangsa ialah adanya interdependensi satu sama lain. Jika kita tidak dapat menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi maka kita akan banyak mengalami kerugian dalam pola hubungan antarbangsa seperti itu. Permasalahan yang ada bahwa wajib belajar sembilan tahun hanya enak diucapkan, didengar, disemboyankan, apalagi dinyanyikan. Sebagian besar bangsa ini tentu mengetahui makna wajib belajar sembilan tahun, Akan tetapi, belum tentu semua warga Negara di republik tercinta ini sadar akan arti penting wajib belajar bagi kehidupan global bangsa di abad ke-21. Oleh karena itu, wajib belajar sembilan tahun perlu diimplementasikan dengan berbagai strategi yang terpadu dan tersistematis secara rapi.

Dalam UUSPN anak-anak yang memiliki bakat istimewa, yaitu mereka yang super pintar memang memperoleh jaminan untuk bisa diperlakukan atau dididik secara khusus. Pasal 8 ayat (2) dari UUSPN menyatakan bahwa "*Warga Negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luarbiasa berhak memperoleh perhatian khusus.*" Namun demikian, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) tersebut masih harus ditetapkan dengan keputusan menteri. Inilah yang perlu segera diperhatikan oleh Departemen Pendidikan Nasional, agar sistem

pendidikan kita segera bisa memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa.

3. Guru

Berkaitan dengan kualitas guru, Joni (2000) mengemukakan adanya tiga dimensi umum yang menjadi kompetensi tenaga kependidikan, antara lain :

1. Kompetensi personal atau pribadi, maksudnya seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap yang patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran : *ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*.
2. kompetensi profesional, maksudnya seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya.
3. Kompetensi kemasyarakatan, artinya seorang guru harus mampu berkomunikasi baik dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas.

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

Gordon dalam Mulyasa (2004) menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi yakni :

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.
4. Nilai (*value*), yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.

Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji dan sebagainya.

6. Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

4. Proses Pembelajaran

Di dalam pengajaran terjadi interaksi antara yang mengajar dan pihak yang diajar dengan istilah populernya adalah “ Proses Belajar Mengajar “. Dalam interaksi tersebut melibatkan beberapa komponen, antara lain : guru, siswa, metode, alat/teknologi, sarana dan tujuan. Untuk mencapai tujuan intruksional masing-masing komponen itu akan saling merespon dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang saling terkait erat. Belajar menunjuk kepada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai yang menerima pelajaran (peserta didik), sedangkan mengajar menunjuk kepada apa yang harus dilakukan oleh seseorang guru yang menjadi pengajar. Jadi, belajar mengajar merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik pada saat proses pengajaran (Ali, 2002).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Ali (2002), bahwa dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar, guru dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan yang bertalian dengan jawaban terhadap suatu pertanyaan, yakni bagaimana menyelenggarakan

pengajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan yang direncanakan. Pertanyaan tersebut menuntun kepada terpenuhinya berbagai persyaratan yang perlu dimiliki oleh seorang guru sehingga dapat melaksanakan tugas dengan berhasil. Persyaratan-persyaratan itu meliputi :

1. Penguasaan materi pelajaran

Penguasaan materi secara baik yang menjadi bagian dari kemampuan guru, biasanya merupakan tuntutan pertama dalam profesi keguruan. Namun seberapa banyak materi harus dikuasai belum ada tolok ukurnya. Dalam praktek, seringkali dapat dirasakan atau diperoleh kesan tentang luas tidaknya penguasaan materi yang dimiliki guru. Namun, itupun bukan merupakan ukuran yang bersifat pasti. Sebab, masih banyak faktor yang berpengaruh terhadap pengajaran selain dari itu. Jadi, yang menjadi ketentuan adalah bahwa guru harus menguasai apa yang akan diajarkan, agar dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman belajar yang berarti kepada siswa.

2. Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip psikologi

Prinsip-prinsip psikologi yang biasanya merupakan hasil penelitian ahli, menjelaskan kepada kita tentang tingkah laku manusia dalam berbagai konteks. Mengajar pada intinya bertalian dengan proses mengubah tingkah laku. Agar memperoleh hasil yang diinginkan secara baik, perlu menerapkan prinsip-prinsip psikologi, terutama yang berkaitan dengan belajar.

3. Kemampuan menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar

Kemampuan menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar merupakan salah satu persyaratan utama seorang guru dalam mengupayakan hasil yang lebih baik dari pengajaran yang dilaksanakan. Kemampuan ini memerlukan landasan konseptual dan pengalaman praktek. Itu sebabnya di lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik calon guru, menyiapkan para calon guru dengan memberikan bekal-bekal teoritis dan pengalaman praktek.

4. Kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi baru

Secara formal maupun profesional, tugas guru seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan tugas profesionalnya. Perubahan dalam bidang kurikulum, pembaharuan dalam sistem pengajaran serta anjuran-anjuran dari “atas” untuk menerapkan konsep-konsep baru dalam pelaksanaan tugas.

C. Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA

Menurut Hughes (dalam Nawawi, 1989) keberadaan sebuah sekolah dalam masyarakat tidaklah cukup diartikan hanya sebagai tempat dimana para murid memperoleh materi pelajaran dari para guru atau tenaga pendidik. Sekolah sebagai lembaga peranannya jauh lebih luas dari pada sekedar tempat belajar.

Perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, sarana merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Tiap aspek kehidupan sosial mempunyai prasarana sendiri yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam kegiatan. Dengan demikian untuk menyukseskan pembangunan, tiap lembaga sosial harus memperhatikan sarananya.

Menurut bentuknya prasarana dibagi dalam bentuk ruang dan bangunan (*space*) dan bentuk jaringan (*network*). Sedangkan macam sarana yang berbentuk ruang/bangunan misalnya rumah, pelayanan umum dan sebagainya (Jayadinata, 1986).

Prasarana menurut fungsi (peran) dapat dikatakan berguna bagi seluruh kebudayaan pada umumnya, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial yang dimaksud adalah kegiatan dalam berkeluarga, kesehatan, pendidikan, agama, rekreasi dan sebagainya sedangkan kehidupan ekonomi adalah kegiatan dalam mata pencaharian, cara berkonsumsi, pertukaran barang dan jasa dan sebagainya. Dalam kegiatan sosial ekonomi terdapat istilah ambang (*threshold*) yang berarti jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menunjang supaya suatu fungsi dapat berjalan lancar.

Suatu masalah dasar dalam pelayanan suatu fungsi misalnya prasarana yang diperlukan oleh jumlah penduduk yang besar jumlahnya adalah masalah tata ruang yang menyangkut:

1. Dimana fasilitas yang mendukung pelayanan tersebut dibangun
2. Berapa banyak fasilitas yang harus dibangun
3. Bagaimana menentukan urutan prioritas dari berbagai fasilitas kebutuhan masyarakat tersebut (Amas, 1988).

Dalam pengembangan atau pembangunan pusat pelayanan dalam pembangunan wilayah umumnya terdapat aspek yang perlu dikaji secara cermat yaitu:

1. Konsentrasi berbagai jenis fasilitas untuk menciptakan adanya aglomerasi pada pusat pelayanan. Konsentrasi berarti terpusatnya berbagai fasilitas pelayanan pada pusat-pusat tertentu dilain pihak penyediaan secara lengkap setiap area adalah tidak efisien karena tiap jenis fasilitas pelayanan khususnya fasilitas sosial mempunyai ambang batas tertentu, artinya untuk efisiensi suatu jenis fasilitas pelayanan ambang batasnya perlu diperhitungkan. Misalnya saja fasilitas sekolah seperti SLTA, sesuai ambang batasnya hanya mungkin dibangun ditingkat kecamatan dan tidak efisien bila dibangun di tingkat Desa.
2. Terdapatnya interaksi sosial dan ekonomi antar penduduk yang bermukim di dalam dan di luar pusat pelayanan.
3. Batas ambang kemampuan pelayanan dan luas wilayah yang dapat dilayani oleh setiap jenis fasilitas pelayanan/fungsi.

Di dalam penyediaan hal-hal tertentu bagi kehidupan sosial keluarga dan masyarakat seperti pemenuhan fasilitas pendidikan terdapat

pengaturan, pengaturan dapat berbentuk standar lokasi, standar jarak, standar luas. Untuk pendidikan di Indonesia terdapat ketentuan berikut:

1. Untuk sekolah dasar harus ada 6 ruang, tiap ruang bagi 40 murid, luas tanah yang diperlukan 8000 m² dan melayani suatu lingkungan dengan 3200 penduduk
2. Untuk sekolah menengah pertama diperlukan 7 ruang, tiap ruang 30 murid, luas tanah yang diperlukan 10.000 m², dapat melayani suatu kawasan tempat tinggal dengan 14.000 penduduk.
3. Untuk sekolah lanjutan atas sebaiknya disediakan 14 ruang, tiap ruang 30 murid, luas tanah yang diperlukan 20.000 m² dapat melayani suatu kawasan tempat tinggal dengan 42.000 penduduk (Jayadinata, 1986)

Persyaratan mengenai prasarana sekolah yang ditetapkan dalam SK. Menteri Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1986 untuk Sekolah Menengah Atas / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah :

- ? Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing dapat menampung 40 murid.
- ? Jumlah ruang belajar setiap sekolah berbeda berdasarkan tipe dari sekolah tersebut, yang terdiri dari Tipe A jumlah ruang kelas 12 dengan kapasitas tampung 480 murid, tipe B jumlah ruang kelas 6, kapasitas tampung 240 murid dan untuk sekolah tipe C jumlah ruang kelas 3, kapasitas tampung 180, sehingga perlu perhitungan secara rinci kapasitas ruang kelas yang ada di suatu wilayah dan jumlah anak usia 7-13 tahun di wilayah tersebut.

D. Migrasi

Pada dasarnya, migrasi adalah pergerakan penduduk secara geografis. Terdapat dua kategori migrasi, yaitu migrasi permanen dan nonpermanen. Perbedaannya terletak pada tujuan pergerakan tersebut. Bila seorang migran bertujuan untuk pindah tempat tinggal secara tetap, migran tersebut dikategorikan sebagai migran permanen, sebaliknya bila tidak mempunyai tujuan pindah tempat tinggal, maka migran tersebut dinamakan migran non permanen, seperti migrasi sirkuler dan migrasi ulang alik (Firman, 1994).

World Bank (1984) dalam Jones dan Yulfita (2004) mengidentifikasi empat komponen pertumbuhan penduduk yaitu : 1) pertumbuhan alami, 2) migrasi ke daerah perkotaan dari provinsi-provinsi lain, 3) migrasi ke daerah perkotaan dalam satu provinsi dan urbanisasi daerah pedesaan serta 4) pertumbuhan alami migran yang datang dalam periode waktu tertentu.

Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi ; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi

untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Arsyad (1999) mengemukakan bahwa migrasi dari desa ke kota dipandang sebagai hal yang menguntungkan pada waktu lalu dalam kajian pembangunan ekonomi. Migrasi internal dianggap sebagai suatu proses yang alamiah dimana surplus kerja secara perlahan ditarik dari sektor pedesaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi pertumbuhan industri perkotaan. Proses tersebut dianggap bermanfaat secara sosial karena sumberdaya manusia dipindahkan dari lokasi-lokasi dimana produk sosial marginalnya (*social marginal product*) sering dianggap sama dengan nol ke tempat-tempat dimana produk marginal tersebut tidak hanya positif tetapi juga tumbuh dengan cepat sebagai akibat dari akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Mobilitas penduduk pada fase V menurut Mantra (2004), ditandai dengan penurunan mobilitas sebagai akibat sarana komunikasi yang sempurna, mobilitas sirkuler meningkat akibat kemampuan bidang telekomunikasi, informasi dan tingginya tingkat pendidikan.

Seiring dengan perjalanan waktu kota mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi dan budayanya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah di

sekitarnya. Secara fisik, perkembangan suatu kota dapat dicirikan dari penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, bangunan-bangunannya yang semakin rapat dan wilayah terbangun terutama permukiman yang cenderung semakin luas, serta semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota (Branch, 1995).

Keban (1994) mengemukakan bahwa migrasi desa - ke kota merupakan gejala yang sangat kompleks dan harus diinterpretasikan secara cermat. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kedatangan migran ke kota sangat bervariasi. Ada yang pindah sebagai langkah awal, ada yang pindah sebagai tahap akhir dari setelah pindah beberapa kali dan ada yang pindah hanya untuk sementara waktu (migrasi nonpermanen).

Pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh migrasi terhadap daerah asal dan daerah tujuan dapat sangat berbeda-beda sesuai dengan ciri-ciri dan daerah-daerah yang bersangkutan dan komposisi dari arus migrasi (Richardson, 2001).

Salah satu faktor utama terjadinya pendorong terjadinya urbanisasi dijelaskan oleh Charles Whyne-Hammond dalam Koester (2001) adalah kemajuan pendidikan. Tidak hanya sekolah-sekolah yang menarik kaum muda untuk pindah ke kota. Media komunikasi massal yang berpusat di kota seperti surat kabar dan siaran radio juga makin menyadarkan

masyarakat pedesaan akan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk sukses dalam usaha.

Yunus (2005), mengemukakan bahwa sesuatu wilayah kota selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini menyangkut aspek-aspek politik, sosial, budaya, teknologi, ekonomi dan fisik. Secara garis besar, terdapat kekuatan-kekuatan dinamis yang mempengaruhi perkembangan kota, yakni kekuatan-kekuatan sentrifugal (*centrifugal forces*) dan kekuatan-kekuatan sentripetal (*centripetal forces*).

Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan pergerakan dan fungsi-fungsi perkotaan dari bagian dalam sesuatu kota menuju bagian luarnya. Kekuatan sentripetal adalah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan, baik penduduk maupun fungsi-fungsi yang berasal dari bagian luar menuju ke bagian dalam daerah perkotaan. Kekuatan-kekuatan tersebut timbul karena adanya faktor pendorong dan penarik. Makin kuat faktor pendorong maupun penarik, makin besar pula kekuatan tersebut dan sebaliknya makin lemah faktor pendorong dan penarik, makin lemah pula kekuatan tersebut.

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang terdapat di daerah asal pergerakan (*place of origin*) sedangkan faktor penarik adalah faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan pergerakan (*place of destination*). Faktor-faktor pendorong mempunyai sifat yang selalu bertentangan dengan faktor penarik baik bagi "*centrifugal movement*" maupun "*centripetal movement*".

Faktor pendorong (*push factor*) yang ada di daerah asal adalah luas lahan yang terbatas dengan harga yang relatif lebih mahal, tingginya tingkat polusi dan kemacetan, kurangnya interaksi antar penduduk dan keamanan. Faktor penarik (*pull factor*) yang ada di daerah tujuan adalah harga lahan yang masih murah dengan luas yang cukup, kemacetan dan polusi rendah, aman dan interaksi antar penduduk masih tinggi. (Yunus, 2005).

Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi. Namun demikian, memiliki implikasi atau dampak tertentu baik dampak positif maupun dampak negatif (Amin, 2006).

Kekuatan-kekuatan konsentrasi atau kekuatan sentripetal dari ekonomi aglomerasi di kota berbanding terbalik dengan kekuatan penyebaran, atau kekuatan sentrifugal dari disekonomi yang menampilkan biaya yang lebih besar dengan meningkatnya pemusatan, karena beberapa faktor produksi dipindahkan. (Todaro, 2004).

Mobilitas spasial menunjukkan kesiapan penduduk untuk berpindah lokasi, salah satunya adalah urbanisasi yang dipengaruhi oleh tiga kondisi yaitu karakteristik wilayah asal dan wilayah tujuan, hambatan dalam perjalanan pindah dan karakteristik kaum urban itu sendiri (Adisasmita, 2005c). Lanjut dijelaskan bahwa adanya karakteristik wilayah asal dan wilayah tujuan merupakan salah satu motivasi penduduk untuk berpindah.

Motivasi dapat dibandingkan antara faktor penarik (*pull factor*) di wilayah tujuan dan faktor pendorong (*push factor*) di wilayah asal.

Kekuatan sentripetal adalah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan, baik penduduk maupun fungsi-fungsi yang berasal dari bagian luar menuju ke bagian dalam daerah perkotaan. Kekuatan-kekuatan tersebut timbul karena adanya faktor pendorong dan penarik. Makin kuat faktor pendorong maupun penarik, makin besar pula kekuatan tersebut dan sebaliknya makin lemah faktor pendorong dan penarik, makin lemah pula kekuatan tersebut.

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang terdapat di daerah asal pergerakan (*place of origin*) sedangkan faktor penarik adalah faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan pergerakan (*place of destination*). Faktor-faktor pendorong mempunyai sifat yang selalu bertentangan dengan faktor penarik baik bagi "*centrifugal movement*" maupun "*centripetal movement*".

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdin (2006) dengan judul Faktor Penarik dan Faktor Pendorong Urbanisasi Siswa SMK di Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penarik dan faktor pendorong terhadap urbanisasi siswa SMK di Kota Bau-Bau. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa pendatang di Kota Bau-Bau yang sementara mengikuti pendidikan di SMK pada jurusan teknik, perikanan, kelautan dan pelayaran, tata kecantikan, perhotelan, tata boga, akuntansi

dan sekretaris. Sampel sebanyak 62 siswa. Analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong bagi siswa melanjutkan pendidikan SMK di Kota Bau-Bau adalah : sarana pendidikan kejuruan di daerah asal tidak tersedia, kurangnya kesempatan kerja setelah lulus, sarana pendidikan kurang menunjang dan gairah belajar kurang. Khususnya siswa yang berasal dari Kabupaten Muna berpendapat bahwa di daerah asal terdapat SMK tetapi kualitasnya rendah. Faktor penarik adalah : Sarana pendidikan di Kota Bau-Bau lengkap, tingginya kesempatan kerja setelah lulus, dan jarak daerah asal cukup dekat. Faktor-faktor lainnya yang tidak mempunyai signifikansi adalah kemampuan ekonomi orang tua memadai, fasilitas kota lengkap, mempunyai kebanggaan, harga diri dan kepercayaan diri kalau studi di Kota Bau-Bau.

Penelitian yang dilakukan oleh Amin (2006) *Karakteristik Siswa dan Mahasiswa Migran serta Potensi Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nganganaumala*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberadaan Siswa dan Mahasiswa Migran terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Nganganaumala. Populasi penelitian ini adalah siswa dan mahasiswa migran yang bermukim di kelurahan Nganganaumala. Sedangkan sampel diambil sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara keberadaan siswa migran dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdiri dari; (1) pendapatan orang tua dengan jumlah kiriman, (2) jumlah

kiriman dengan pengeluaran, (3) tingkat pendidikan keluarga dengan kualitas hunian, (4) tingkat pendidikan keluarga dengan kesadaran kependudukan, (5) aktualisasi diri dengan kualitas hunian. Hal ini berimplikasi terhadap dampak yang ditimbulkan, dimana dampak positif pada peningkatan pendapatan melalui persewaan lahan dan rumah kontrakan, munculnya warung-warung dan toko-toko yang mampu menggerakkan perdagangan eceran. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah kepadatan penduduk yang tidak terkendali dan permukiman kumuh sebagai akibat dari kesadaran kependudukan dan kesadaran kualitas hunian yang rendah.

E. Kerangka Konsep Penelitian

Dalam suatu wilayah, tata ruang terdiri dari pusat-pusat (kota-kota) dan daerah belakang. Selain pusat besar, terdapat pula banyak pusat kecil. Di daerah-daerah perkotaan terdapat fasilitas-fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial yang lebih lengkap dibandingkan di luar perkotaan. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sarana lengkap tersedianya fasilitas di suatu daerah perkotaan, yang berarti semakin kuat daya tariknya mengundang penduduk dan kegiatan-kegiatan produktif untuk datang ke perkotaan. Pada umumnya kota mempunyai dua fungsi yaitu selain sebagai pusat administrasi pemerintahan, merupakan pula pusat perdagangan, pengangkutan dan pelayanan sosial lainnya (Adisasmita, 2005c).

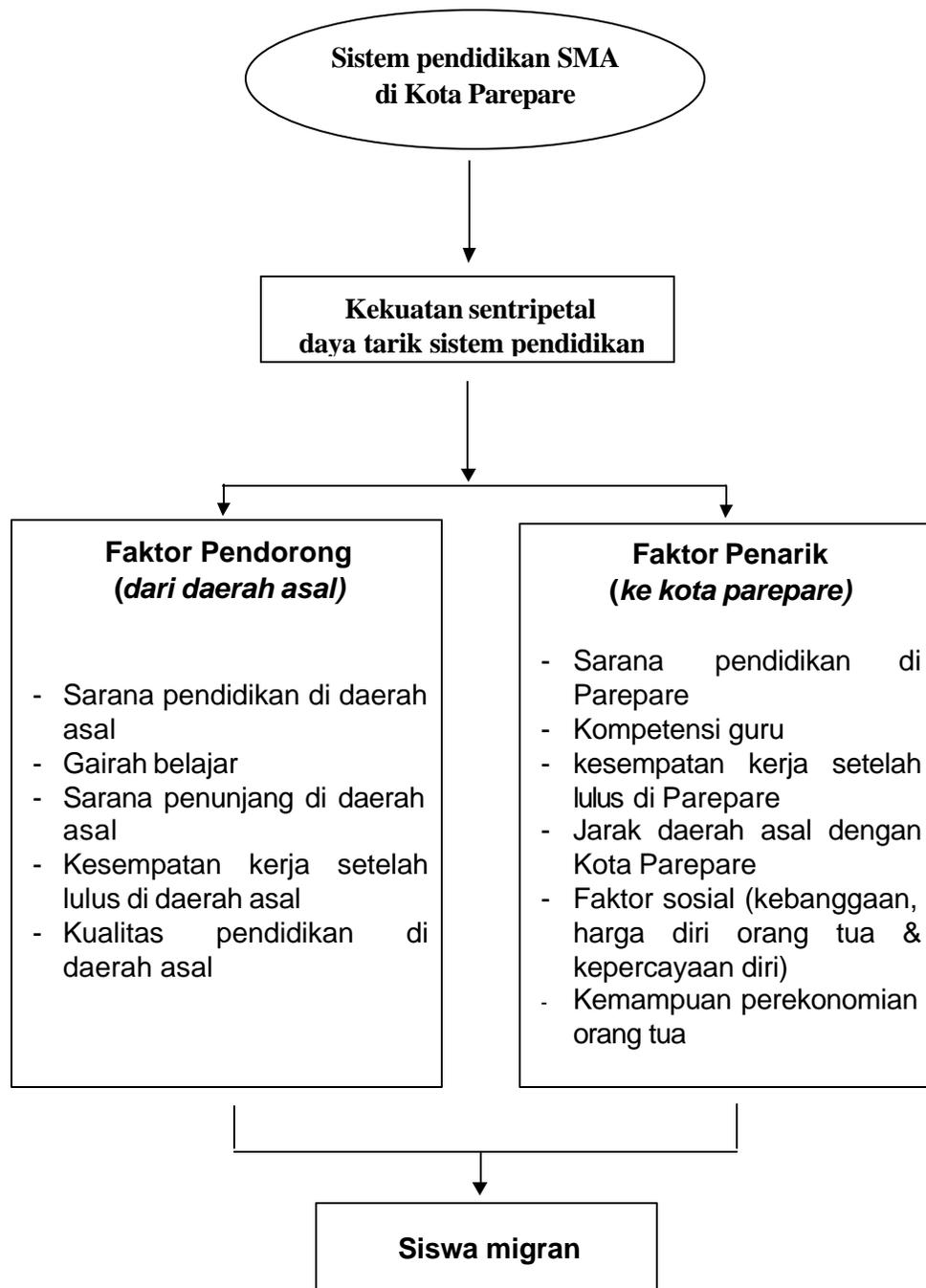
Pengalaman memperlihatkan bahwa ada berbagai faktor, fenomena dan derajat intensitas tertentu yang dapat menjelaskan

pertumbuhan suatu wilayah. Dalam suatu wilayah dapat ditemukan bahwa faktor sosial demikian kuat mempengaruhi perkembangan wilayahnya. Sementara itu, pada wilayah lain pengaruh kekuatan ekonominya mungkin mendominasi. Pengaruh faktor tersebut dapat berjalan sangat spesifik, saling berkombinasi, maupun bergerak dinamis mengikuti proses dan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai.

Salah satu fenomena tersebut adalah fenomena “pusat-pinggir”. Perkembangan wilayah mengarah pada terbentuknya wilayah inti dan wilayah pinggiran. Wilayah berkembang terutama karena proses-proses transaksi, perdagangan dan pelayanan sosial sedemikian rupa sehingga membentuk wilayah fungsional yang berciri saling ketergantungan antar wilayah.

Kota Parepare sebagai kota dengan pusat pelayanan sosial yang lengkap, salah satunya adalah pendidikan berkembang cukup pesat yang ditandai dengan keberadaan berbagai lembaga pendidikan baik menengah maupun tinggi dengan mutu luaran yang terjamin menjadi daya tarik kota. Kondisi ini memunculkan mobilitas penduduk sekitar untuk masuk di Kota Parepare cukup besar. Hal ini didukung pula oleh adanya daya dorong dari daerah asal dan daya tarik Kota Parepare. Sehingga berimplikasi mengalirnya migrasi dari daerah sekitar ke Kota Parepare. Migrasi ini menyebabkan terjadinya penambahan penduduk yang berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi, baik bagi masyarakat Kota Parepare maupun bagi siswa pendatang. Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai analisis

Daya Tarik Sistem Pendidikan SMA terhadap Peningkatan Jumlah Siswa Migran di Kota Parepare.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian